

# Pansus Telusuri Tiga Pokok Masalah PDAM

Kubu Raya, BERKAT.

Sidang paripurna DPRD Kubu Raya pada Selasa (10/7) kemarin akhirnya menyetujui dibentuknya Pansus PDAM Tirta Raya selain disahkannya SK Alat Kelengkapan dan persetujuan pinjaman Pemkab ke Bank Kalbar senilai Rp30 miliar. Untuk Pansus PDAM terpilih sebagai ketua yakni Agus Sudarmansyah setelah melalui mekanisme voting sesama anggota pansus. Kepada wartawan, Agus Sudarmansyah memastikan akan menelusuri permasalahan yang terjadi di tubuh PDAM Tirta Raya. Karena selama ini dianggap banyak kejanggalan yang didapat. Terlebih, temuan BPK RI dalam LHP nya menjabarkan sejumlah item yang patut menjadi perhatian dan mesti dipertanggung jawabkan.

"Seperti masalah pengelolaan keuangan, aset dan status pejabat PDAM yang belum definitif," ungkapnya. Masalah pengelolaan keuangan disebutkan Agus ada sejumlah anggaran yang dikucurkan baik dari Pemkab, Pemprov maupun pusat untuk jaringan pengembangan air bersih hingga sekarang belum jelas. Begitu pula masalah aset dari Pemkab Pontianak maupun Pemkab

## PERMASALAHAN PDAM

- Penyerahan Modal dari Pemkab dan Pemprov Rp20.667.780.000
- Penyerahan kekayaan dari Pemkab Pontianak Rp385.500.000
- Kekayaan yang dipisahkan dari Pemkab Rp735.000.000
- Penyerahan Pemkab Rp2.966.077.000
- Realisasi dari Dinas Cipta Karya Rp4.793.456.000
- Status pejabat PDAM masih Plt belum definitif



Kubu Raya sendiri. Kaitan dengan status pejabat Plt yang hingga kini belum definitif. Agus sangat menyayangkan hal ini terjadi cukup lama. Sehingga muncul pertanyaan apakah PDAM berstatus BUMD atau milik perorangan. Padahal, Perda Nomor 5 tahun 2011 telah disahkan. Disitu jelas, pejabat yang ada di PDAM mesti sudah dipilih secara definitif tidak lagi masih berstatus Plt (Pelaksana Tugas).

"Kita ditargetkan bekerja sampai 30 Juli mendatang. Jika memang tidak ada toleransi dari PDAM sendiri maka bisa saja direkomendasikan ke ranah hukum

pidana," tegasnya. Prinsipnya ditegaskan Agus, bahwa dalam konteks ini bukan untuk mencari kesalahan namun perbaikan sehingga pengelolaan PDAM benar-benar lebih profesional dan maju.

Sementara itu Ketua DPRD Kubu Raya, Sujiwo SE menegaskan dibentuknya pansus ini atas hasil usulan Panja Tentang LHP BPK RI yang menemukan sejumlah kejanggalan di tubuh PDAM. "Masalah ini salah satunya yang menyebabkan BPK RI memberikan wajar tanpa pengecualian. Padahal, PDAM adalah institusi yang memberikan kebutuhan dan pelayanan dasar bagi masyarakat," ujarnya.

Sebenarnya menurut Sujiwo jika PDAM dikelola dengan baik dan profesional maka akan sangat berpotensi meningkatkan pendapatan daerah. Seperti Sui Raya memiliki potensi besar untuk itu. Dan terkait dengan status

pejabat PDAM yang masih Plt, Sujiwo meminta sudah saatnya Bupati bertindak tegas. Karena Perda PDAM sudah disahkan. Disitu diberikan kesempatan untuk merekrut Dewan Pengawas, Badan Pemeriksa atau Direktornya. Kondisi ini tentunya berpengaruh dalam soal kewenangan sehingga tidak memiliki otoritas penuh untuk mengambil sebuah keputusan. "Niat kita di sini hanya untuk meluruskan dan membenahi agar persoalan PDAM terselesaikan. Tidak ada kita punya kepentingan apapun," kata Sujiwo lagi.

Sayangnya Plt PDAM Tirta Raya, Gandhi Satyagraha yang dihubungi berkali-kali via telepon untuk konfirmasi tidak menjawab. Begitu pula pesan singkat yang dikirim tidak ada balasan. (rob)